Analisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting Kabupaten Solok Selatan

Netrivianti
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

Base umpteen acquired research yielding. 1), in BAMUS Nagari's task and authority performing Padang Ganting is deep regulation makings area Nagari with Wali Nagari (legislation), areas supervisory area society aspiration, forming Wali Nagari's electoral college, arranging BAMUS Nagari's discipline and the whole lot was performed with every consideration. 2), about problem which often been faced by BAMUS Nagari Padang Ganting in task and authority performing it is subtracted science will task and function, the number of times misunderstanding happening among Wali nagari and BAMUS Nagari, constraint in supervisory logistic performing. All about problem this cover BAMUS Nagari's mechanism and authority problem guard tradition at nagari. About problem other is the number of times misunderstanding happening among commanding nagari and BAMUS Nagari, particularly in term nagari's finance accountability. 3), effort those are done to settle that problem is need it to increase construction form and technical skill applications to membered BAMUS Nagari, endeavoring BAMUS Nagari's membered candidates that assessed by kapabel and as much as can represents all society element and not only just as rely person that have big influence.

I. Pendahuluan

Perjalanan pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pasca pemekaran telah menunjukkan perkembangan yang signifikan baik dari segi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan. Upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diupayakan terus menjadi maksimal dengan menjangkau seluruh wilayah administrasi pemerintahan. Sebagai pelaksana pelayanan publik kepada masyarakat pemerintahan nagari sebagai unit terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, merupakan garda terdepan motor pembangunan. Perkembangan pemerintahan nagari yang pada awal-awal pemekaran hanya berjumlah 12 nagari terus mengalami peningkatan. Pemekaran pemerintahan nagari yang dilakukan pemerintah daerah bukan tanpa alasan. Adapun yang mendasari pemekaran pemerintahan nagari adalah sebagai implemantasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Nagari di mana dalam Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut memberikan peluang sebuah pemerintahan nagari adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, memperpendek birokrasi serta pemerataan pembangunan di nagari. Selama ini pembangunan di nagari hanya berfokus pada tingkatan jorong yang mudah diakses dan dekat dengan pusat pemerintahan nagari, sehingga jorong-jorong yang secara geografi tergolong

kategori terisolir seakan-akan terabaikan. Peningkatan jumlah pemerintahan nagari yang pada awalnya hanya 12 (dua belas) nagari induk menjadi 35 nagari merupakan lonjakan jumlah yang besar.

Pemekaran pemerintahan nagari juga beriringan dengan pemekaran 2 (dua) kecamatan baru masing-masing Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Sangir Balaik Janggo, sehingga secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Solok Selatan menjadi 7 (tujuh) kecamatan. Penambahan jumlah kecamatan ini menyebabkan terjadinya pergeseran wilayah pemerintahan nagari. Ada pemerintahan nagari yang tetap berada pada kecamatan induk dan ada yang menjadi masuk pada kecamatan pemekaran.

Terjadinya pemekaran pemerintahan nagari secara otomatis juga menyebabkan terjadinya pemerintahan yang baru di nagari. Dalam sistem pemerintahan nagari yang dimaksud dengan pemerintahan nagari adalah Wali Nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari. Di antara nagari-nagari hasil pemekaran Nagari Padang Ganting merupakan salah satu nagari hasil pemekaran dari Nagari Lubuk Malako dalam wilayah Kecamatan Sangir Jujuan. Keberadaan pemerintahan Nagari Padang Ganting dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari. Untuk kelancaran pemerintahan nagari di Padang Ganting setelah pemekaran segera dibentuk Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dengan jumlah anggota terdiri dari 11 (sebelas) orang. Walaupun pemerintahan nagari dalam hal ini Wali Nagari dan BAMUS Nagari telah melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi dalam pelaksanaannya dirasakan belum maksimal, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kedua lembaga mungkin sepenuhnya belum dipahami. BAMUS Nagari sebagai mitra Wali Nagari memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga antara tugas dan kewenangan BAMUS Nagari tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang Wali Nagari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi bahasan penulis dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, khususnya terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS Nagari, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?
3. Apa saja langkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Mengingat dasar penelitian ini bersifat studi kasus, sehingga metode pengumpulan data akan lebih banyak diadakan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci (*key informan*) yang terpilih. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota (BAMUS) Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan heterogenitasnya yang dapat sirinci sebagai berikut: Ketua BAMUS Padang Ganting; Sekretaris; Ketua Komisi A; Ketua Komisi B; dan Satu orang anggota.

III. Pembahasan

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan

Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan adalah Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki tugas dan wewenang, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Nagari bersama Wali Nagari Padang Ganting;
- b. Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Nagari;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting dapat dilihat sebagai berikut:

Kinerja Penetapan Peraturan Nagari (legislasi)

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, kedudukan BAMUS Nagari sebagai mitra kerja pemerintah nagari sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang BAMUS Nagari dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari. BAMUS Nagari Padang Ganting selalu bersama-sama dengan pemerintah nagari dalam membuat dan menetapkan Peraturan Nagari.

Tugas dan wewenang BAMUS Nagari Padang Ganting dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari. Tugas dan wewenang ini dilaksanakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Peraturan Nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari. Proses yang dilakukan oleh BAMUS Nagari dan Wali Nagari di dalam merumuskan Peraturan Nagari antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Perangkat Nagari) mengundang anggota BAMUS Nagari untuk menyampaikan maksudnya membentuk Peraturan Nagari dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan nagari yang diajukan.
 - b. BAMUS Nagari terlebih dahulu mengajukan Rancangan Peraturan Nagari, demikian halnya dengan pemerintah nagari yang juga mengajukan Rancangan Peraturan Nagari.
 - c. BAMUS Nagari memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan Rancangan Peraturan Nagari.
 - d. Ketua BAMUS Nagari menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah nagari untuk diagendakan.
 - e. BAMUS Nagari mengadakan rapat dengan pemerintah nagari kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.
- 2) Menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Pemerintah Nagari. Setelah BAMUS Nagari dan Wali Nagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BAMUS Nagari dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian Rancangan Peraturan Nagari tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Nagari. Dalam menetapkan peraturan nagari, antara BAMUS Nagari dan wali nagari sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:
 - a. BAMUS Nagari menyetujui dikeluarkannya Peraturan Nagari.
 - b. Wali Nagari menandatangani Peraturan Nagari tersebut.
 - c. BAMUS Nagari membuat berita acara tentang Peraturan Nagari yang baru ditetapkan.
 - d. BAMUS Nagari mensosialisasikan Peraturan Nagari yang telah disetujui pada masyarakat melalui Wali Jorong untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya. Proses yang dilakukan BAMUS Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari adalah: (1) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari setelah mendapatkan persetujuan dari BAMUS Nagari, dan (2) Peraturan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari bersama Ketua BAMUS Nagari.

Hasil kerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam membahas Rancangan Peraturan Nagari

adalah sebagaimana diuraikan di atas adalah adanya beberapa peraturan nagari yang telah ditetapkan untuk Peraturan Nagari Padang Ganting. Proses pembuatan Peraturan Nagari mulai dari merumuskan Peraturan Nagari sampai pada menetapkan Peraturan Nagari yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah nagari, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi. Dalam proses pembuatan Peraturan Nagari dilakukan bersama-sama dengan pemerintah nagari tidak ada hambatan baik dari dalam maupun dari luar, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Nagari tersebut itu sudah hal yang biasa.

Selain itu, BAMUS Nagari Padang Ganting juga mengawasi jalannya pemerintah nagari. Tugas dan wewenang dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, BAMUS Nagari Padang Ganting berhak meminta pertanggungjawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada pemerintah nagari. Pelaksanaan dari tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan BAMUS Nagari Padang Ganting adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Nagari, dalam hal ini yaitu pemerintah nagari. Segala tindakan pemerintah nagari selalu dipantau oleh BAMUS Nagari Padang Ganting, baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan nagari menyimpang dari ketentuan atau tidak.

Dalam praktek pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari di Nagari Padang Ganting selama ini Peraturan Nagari sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan dalam pengawasan BAMUS Nagari terhadap pemerintah nagari tidak ada hambatan-hambatan yang cukup besar, sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BAMUS Nagari untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada, karena hanya dengan teguran saja dan itu sudah berhasil.

2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Wali Nagari setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Nagari Padang Ganting dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas nagari.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selama ini belum ditemukan kendala yang besar, hanya saja menyangkut pembagian beras untuk rakyat yang kurang mampu (RASKIN) yang dalam kurun waktu tertentu sempat macet, karena kurangnya kesadaran petugas terhadap rakyat kurang mampu.

3) Pengawasan terhadap Keputusan Wali Nagari.

Wali Nagari di dalam melaksanakan pemerintahan nagari juga berhak untuk membuat keputusan Wali Nagari. Keputusan Wali Nagari dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Nagari. Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Padang Ganting terhadap keputusan Wali Nagari, yaitu sebagai berikut:

- a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- e. Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan terjadi tindakan penyelewengan. Proses pembuatan keputusan tersebut harus sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Wali Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat nagari.

Kinerja BAMUS Nagari sebagai Pelaksana Fungsi Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting sebagai wakil rakyat di nagari adalah sebagai tempat bagi masyarakat nagari untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan BAMUS Nagari untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti, yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah nagari, BAMUS Nagari itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan, yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BAMUS Nagari pada saat ada pertemuan nagari dan ketika ada rapat BAMUS Nagari.

Adapun cara BAMUS Nagari Padang Ganting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. BAMUS Nagari menyampaikan dan membahasnya bersama pemerintah nagari pada pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Apabila masalahnya sulit, maka BAMUS Nagari langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari untuk membicarakan masalah dimaksud. BAMUS Nagari Padang Ganting dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis ataupun secara lisan, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BAMUS Nagari atau rapat BAMUS Nagari setiap 40 hari dan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Akan tetapi untuk hal-hal yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan nagari kapan saja waktunya.

Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

Dalam hal mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari, BAMUS Nagari Padang Ganting selama ini belum terlaksana, karena Wali Nagari Padang Ganting selama ini dinilai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi BAMUS Nagari Padang Ganting untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Wali Nagari sebelum masa jabatannya berakhir.

Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari

Tugas dan wewenang BAMUS Nagari Padang Ganting dalam hal pembentukan panitia pemilihan wali nagari sudah dilaksanakan dengan baik, di mana pemilihan walinagari sudah dilakukan satu kali.

Menyusun Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari

Pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS Nagari Padang Ganting dalam hal penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tata tertib BAMUS Nagari Padang Ganting saat ini.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting yang memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan peraturan nagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari dan pelaksanaan peraturan nagari, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, membentuk panitia pemilihan wali nagari, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di nagari serta menyusun tata tertib BAMUS Nagari meskipun sebagian sudah dimanfaatkan namun selama ini masih menemui beberapa kendala, yaitu:

Kurangnya Pengetahuan tentang Tugas dan Fungsi

Salah satu hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS Nagari Padang Ganting adalah pengurus yang tergabung dalam wadah ini sebagian belum memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan wewenang dari BAMUS Nagari itu sendiri. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman antara BAMUS Nagari serta perangkatnya yang selama ini menjadi penguasa tunggal di nagari.

Penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi, karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BAMUS Nagari Padang Ganting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari BAMUS Nagari Lubuk Gadang yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun secara umum dinilai baik, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BAMUS Nagari Padang Ganting, yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan

lembaga tersebut tugas pengawasan dari BAMUS Nagari dinilai sebagai tugas yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan tugas dan wewenang yang lain. Sedangkan tugas pengawasan merupakan tugas yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.

Seringnya Terjadi Kesalahpahaman Antara Walinagari dan BAMUS Nagari

Keberadaan BAMUS Nagari sepenuhnya telah diakui pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah di nagari. Kesalahpahaman antara BAMUS Nagari Padang serta perangkat nagari lainnya masih sering terjadi, seperti yang terungkap ada beberapa permasalahan, di antaranya masalah mekanisme dan kewenangan BAMUS Nagari mengayomi adat-istiadat di nagari. Permasalahan lain adalah seringnya terjadi kesalahpahaman antara pemerintah nagari dan BAMUS Nagari, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan nagari.

Di samping itu, permasalahan lain berupa penetapan aturan dan mekanisme di nagari, pemerintah nagari juga cenderung merasa sebagai *single power*. Ketika BAMUS Nagari mengundang masyarakat untuk mengadakan suatu koordinasi terkait pelaksanaan pemerintahan di nagari, ada pemerintah nagari yang protes dan mempertanyakan, bagaimana keberadaan BAMUS Nagari sehingga berani mengundang masyarakat tanpa melalui pemerintah nagari. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa BAMUS Nagari itu bukan milik rakyat. Padahal, bukankah BAMUS Nagari itu dibentuk berdasarkan undang-undang.

Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Salah satu laporan dari masyarakat Nagari Padang Ganting yang sering diterima oleh BAMUS Nagari adalah mengenai kasus RASKIN yang sempat terkendala. Hal ini merupakan masalah yang rawan, kemudian BAMUS Nagari menindaklanjuti apa yang didapat dari masyarakat dan memprosesnya dengan cara mengadakan pertemuan dengan Wali Nagari untuk mencari solusi dari masalah yang diadukan oleh masyarakat nagari tersebut. Akhirnya setelah diadakan pertemuan antara pemerintah nagari dalam hal ini khususnya Wali Nagari, BAMUS Nagari dan masyarakat nagari, akhirnya persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Langkah yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan

Masih terdapatnya pelaksanaan tugas dan wewenang dari BAMUS Nagari Padang Ganting yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BAMUS Nagari perihal pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta faktor-faktor yang lain, yaitu ketiadaan ruang privasi bagi para anggota BAMUS Nagari dan masih minimnya honor yang diterimanya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sebagaimana penulis uraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan Pembinaan

Mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada para anggota BAMUS Nagari Padang Ganting. Mengupayakan kaderisasi calon anggota BAMUS Nagari yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewakili seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan semata, pengadaan sarana dan prasarana serta perumusan kebijakan guna meningkatkan jumlah kompensasi atau honor yang diterima oleh para anggota BAMUS Nagari.

Sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan peranan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dalam proses pembuatan peraturan nagari di Nagari Padang Ganting perlu upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota BAMUS Nagari dan kesejahteraannya serta peningkatan sarana dan prasarana kerja agar BAMUS Nagari dapat lebih rasional di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sekarang hubungan Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari Padang Ganting menjadi lebih baik karena beberapa alasan:

1. Mulai tumbuhnya kesadaran, pengertian tentang hak dan kewajiban mereka;
2. BAMUS Nagari sudah dilibatkan dari awal-sampai akhir setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan;
3. Mereka menyadari bahwa mitra adalah saling mengisi, memahami dan memecahkan masalah bersama-sama.

2. Mengikutsertakan Anggota BAMUS Nagari melalui Pelatihan

Agar BAMUS Nagari lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam beberapa hal, yaitu (1) rencana strategis (*strategic planning*), (2) perlunya anggota BAMUS Nagari mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang BAMUS Nagari agar lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, (3) BAMUS Nagari dan Pemerintah Nagari agar bisa membedakan antara tugas dan keluarga, (4) bagi panitia pemilihan BAMUS Nagari Padang Ganting, hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak mengulangi adanya penyimpangan terhadap persyaratan menjadi anggota BAMUS Nagari, seperti yang seharusnya berpendidikan minimal SLTP.

3. Mengfektifkan Pelaksanaan Fungsi BAMUS Nagari

Sesuai dengan tugas dan wewenang dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi (menetapkan Peraturan Nagari bersama Walinagari), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BAMUS Nagari Padang Ganting dengan pemerintah nagari Padang Ganting. Pada level nagari perlu dibangun *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen nagari yang

direpresentasikan melalui kelembagaan BAMUS Nagari dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan nagari. Tentunya ini dapat terwujud apabila BAMUS Nagari memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah nagari tetapi juga terhadap pemerintah daerah.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Nagari Padang Ganting dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Kinerja BAMUS Nagari dalam bidang pembuatan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari (legislasi) berupa perumusan Peraturan Nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Pemerintah Nagari. Tugas dan wewenang ini sudah berjalan dengan baik.
 - b. Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dengan cara BAMUS Nagari mengawasi semua tindakan pemerintah nagari dalam menjalankan roda pemerintahan nagari yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung.
 - c. Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BAMUS Nagari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BAMUS Nagari dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah nagari atau pun untuk BAMUS Nagari itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BAMUS Nagari atau pertemuan nagari.
 - d. Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari selama ini belum terlaksana karena Wali Nagari selama ini dinilai dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sehingga tidak ada alasan bagi BAMUS Nagari untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Wali Nagari sebelum masa jabatannya berakhir.
 - e. Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam membentuk panitia pemilihan wali nagari dapat dilihat pada pemilihan Wali Nagari Padang Ganting.
 - f. Kinerja BAMUS Nagari Padang Ganting dalam menyusun Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tata tertib BAMUS Nagari Padang Ganting saat ini.
2. Permasalahan yang sering dihadapi oleh BAMUS Nagari Padang Ganting dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah kurangnya pengetahuan akan tugas dan fungsi, seringnya terjadi kesalahpahaman antara Walinagari dan BAMUS Nagari, kendala dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan. Semua permasalahan ini meliputi masalah mekanisme dan kewenangan BAMUS Nagari mengayomi adat-istiadat di nagari. Permasalahan lain adalah seringnya terjadi kesalahpahaman antara pemerintah nagari dan BAMUS Nagari, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan nagari.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlunya mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada para anggota BAMUS Nagari, mengupayakan kaderisasi calon-calon anggota BAMUS Nagari yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewakili seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan semata, pengadaan sarana dan prasarana serta perumusan kebijakan guna meningkatkan jumlah kompensasi atau honor yang diterima oleh para anggota BAMUS Nagari, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota BAMUS Nagari dan kesejahteraannya serta peningkatan sarana dan prasarana kerja agar BAMUS Nagari dapat lebih rasional di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS Nagari di Nagari Padang Ganting, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. BAMUS Nagari Padang Ganting agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
2. Perlunya para anggota BAMUS Nagari Padang Ganting diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BAMUS Nagari seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas dan wewenang BAMUS Nagari, terutama untuk anggota BAMUS Nagari yang baru dilantik. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BAMUS Nagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Daftar Pustaka

- Anshar, S. (2019). PENERAPAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
- Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Aditya Media, Yogyakarta, 1996.
- Dedy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Dewi R dan Sri Wahyuni, *Sistem Perencanaan*, Puslitbang, Bogor.
- Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Gatut Priyowidodo dan Ruslan Ismail Mage, *Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan Tesis*, Eka Sakti Press, Padang, 2003.

- Joe Fernandez dkk, *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*, IPCOS, Yogyakarta, 2002.
- Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan Sosial Politik*, Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung, Cetakan-1, 2006.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Mardikanto, *Menuju Masyarakat Partisipatif.*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Mulia, R. A. (2019). INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 37-56.
- Nat J Colletta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
- Samuel, P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Prestasi Pustakakrya, Jakarta, 2006.
- Slamet Y, *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfa Beta, Bandung, 2001.
- Sugiarto, dkk, *Teknik Sampling*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok.*, CV. Rajawali dan YIIS, Jakarta, 1982.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Zuryawan Isvandiar Zoebir, *Makalah Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah*, Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Sosial FISIP-UI, 2009.